

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan pribadi yang efektif dan bertanggung jawab merupakan suatu tindakan untuk mencapai kesejahteraan keuangan di masa yang akan datang. Setiap individu memiliki caranya sendiri dalam mengelola keuangan pribadinya termasuk dalam mengelola pendapatan yang diperolehnya secara rutin pada tiap bulannya. Saat individu memperoleh pendapatan atas hasil kerjanya, mereka memiliki cara yang berbeda-beda dalam menggunakan uangnya. Bisa dengan mengalokasikan uang untuk tabungan, memenuhi kebutuhan pribadinya atau keluarganya, melakukan hobi yang disukainya, dan lain sebagainya. Bila dihubungkan dengan hal yang terjadi saat ini, dimana perkembangan zaman cenderung mempercepat perkembangan modernisasi, gaya hidup, pola pikir, dan perilaku individu yang tidak terkecuali perilaku konsumsi individu. Dimana saat zaman sudah maju, dapat memberi dampak terhadap perilaku konsumsi individu yang selalu ingin mengikuti tren yang sedang zaman saat itu. Hal ini berdampak dengan, individu cenderung kurang wajar dalam menggunakan uang pribadinya, karena cenderung berpikir jangka pendek dan kurangnya tanggung jawab terhadap penggunaan uang pribadinya. Contoh dimana individu banyak membelajakan uangnya untuk produk atau jasa yang sebenarnya bukan sebuah kebutuhan, melainkan hanya karena suatu keinginan semata. Khususnya dalam penggunaan uang, seorang individu harus bisa menggunakan akal sehat bukan dengan keinginan semata, karena itu dapat berdampak individu bertindak konsumtif

dalam penggunaan uang. Hal ini berakibat dengan terganggunya kestabilan keuangan individu yang berakhir dengan terjadinya masalah keuangan. Karena pendapatan yang diperoleh tidak dapat dikelola dengan baik dan sudah habis bahkan hanya untuk sekedar pengalokasian dana keuangan untuk menabung. Banyak individu dengan pendapatan yang cukup masih mengalami masalah keuangan karena perilaku pengelolaan keuangan personal yang kurang bertanggung jawab.

Masyarakat di Surabaya memiliki berbagai macam mata pencaharian seperti bekerja dalam bidang pertanian, industri, dan jasa-jasa lainnya. Data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya menyebutkan bahwa angkatan kerja pada tahun 2018 sejumlah 1.520.041 orang, namun untuk masyarakat yang berkerja di Surabaya pada tahun 2018 tercatat sejumlah 1.426.945 orang. Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya juga mencatatkan bahwa berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada tahun 2018, masyarakat di Surabaya paling banyak pada sektor jasa sebanyak 78.71% (1.115.430 orang), disusul dengan sektor industri sebanyak 21.50% (306.854 orang), dan sektor pertanian sebanyak 0.33% (4.661 orang). Adapun status pekerjaan utama yang terbanyak sebagai buruh/karyawan/pegawai (64.07%), berusaha sendiri (16.47%), pekerja bebas di pertanian (5.27%), berusaha dibantu buruh (3.62%), dan bekerja bebas di non pertanian (3.35%) (<https://surabayakota.bps.go.id>) Diakses 17 Januari 2020.

Dengan banyaknya individu yang memiliki pekerjaan utama sebagai pegawai terkadang berbanding terbalik dengan perilaku dalam pengelolaan keuangannya karena kurangnya pengetahuan keuangan yang dimilikinya. Saat ini pengetahuan keuangan menjadi perhatian khusus pemerintah, tidak terkecuali

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh OJK menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2016 berada pada angka 29,7%, kemudian survei kembali dilaksanakan pada tahun 2019 dan hasil menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan keuangan masyarakat Indonesia mengalami kenaikan yaitu pada angka 38,03% (<https://www.ojk.go.id>) Diakses 25 Januari 2020. Persentase tersebut dari sudut pandang jumlah memang mengalami kenaikan, namun tingkat pengetahuan keuangan masyarakat Indonesia terbilang rendah dibandingkan dengan negara di ASEAN lainnya. Seperti Malaysia yang masyarakatnya memiliki tingkat pengetahuan keuangan mencapai 66% , Thailand tingkat pengetahuan keuangan mencapai 73%, dan Singapura yang tingkat pengetahuan keuangan yang tergolong tinggi mencapai 98%. Hal ini diperjelas juga berdasarkan artikel yang berjudul “Melek Keuangan Masyarakat Indonesia Masih Di Bawah Singapura dan Malaysia”. Artikel tersebut menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat di Indonesia tentang keuangan masih tergolong rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya (<https://finance.detik.com/melek-keuangan-masyarakat-indonesia-masih-di-bawah-singapura-dan-malaysia>) Diakses pada 24 Januari 2020. Oleh karena itu, pengetahuan keuangan sangat dibutuhkan masyarakat agar dapat mengelola keuangan dengan baik dan didukung dengan sikap keuangan dan *locus of control* yang dimiliki.

Hidup di wilayah perkotaan tidak menjamin seorang individu mampu dalam mengelola keuangannya dengan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat di wilayah perkotaan mengalami perubahan gaya hidup yang dimana mulai mengikuti tren yang ada. Dari sinilah yang akhirnya berdampak dengan tingginya

tingkat konsumsi individu, yang dimana individu tersebut ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dan akhirnya dapat berdampak dengan pendapatan yang sulit dialokasikan untuk menabung. Menurut hasil survei konsumen yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada tahun 2018 – 2019 terkait dengan alokasi penggunaan pendapatan masyarakat di Provinsi Jawa Timur, khususnya Ibukota Provinsi yaitu Surabaya, menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat paling banyak dialokasikan untuk :

Tabel 1.1 Alokasi Pendapatan Masyarakat Surabaya

No	Alokasi Pendapatan	Triwulan IV 2018	Triwulan I 2019	Triwulan II 2019	Triwulan III 2019
1	Konsumsi	67,07 %	65,00 %	67,60 %	66,83 %
2	Pembayaran Pinjaman	16,06 %	14,96 %	15,46 %	10,49 %
3	Tabungan	16,99 %	20,03 %	17,94 %	22,68 %

Sumber : www.bi.go.id (diolah penulis) diakses pada 27 Februari 2020

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa alokasi pendapatan masyarakat di Surabaya pada Triwulan IV 2018 – Triwulan III 2019 mengalami fluktuasi (kenaikan dan penurunan). Pada Triwulan IV 2018 dimana alokasi pendapatan masyarakat Surabaya untuk konsumsi 67,07%, tabungan 16,99%, dan pembayaran pinjaman 16,06%. Sedangkan pada Triwulan I 2019 pendapatan masyarakat dialokasikan untuk konsumsi 65,00%, tabungan 20,03%, dan pembayaran pinjaman 14,96%, dapat dilihat pada Triwulan I 2019 dimana masyarakat mengurangi porsi konsumsi, hal ini terlihat dimana persentase alokasi pendapatan untuk tabungan mengalami kenaikan yang akhirnya alokasi pendapatan untuk

pembayaran pinjaman mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Puncak konsumsi terjadi pada Triwulan II 2019 terlihat dimana persentase konsumsi cukup tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, dimana alokasi pendapatan untuk konsumsi mencapai 67,60%, tabungan 17,94%, dan pembayaran pinjaman 15,46%. Pada Triwulan II 2019 terlihat masyarakat mengurangi porsi pendapatan untuk tabungan, yang digunakan untuk pembiayaan konsumsi dan pembayaran pinjaman, hal ini terlihat jelas dimana persentase tabungan mengalami penurunan sedangkan persentase konsumsi dan pembayaran pinjaman mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada Triwulan III 2019 tingkat pengalokasian pendapatan untuk konsumsi mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu 66,83% dan hal yang sama terjadi pada alokasi pembayaran pinjaman juga mengalami penurunan mencapai 10,49% dibanding triwulan sebelumnya. Karena terjadi penurunan pengalokasian pendapatan untuk konsumsi dan pembayaran pinjaman, porsi pendapatan untuk tabungan mengalami peningkatan mencapai 22,68% yang dimana persentase tersebut menjadi persentase alokasi pendapatan tabungan tertinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari data tersebut terlihat bahwa pengalokasian pendapatan masyarakat di Surabaya paling banyak digunakan konsumsi. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat di Surabaya masih belum meminimalkan hutang sebagai bagian dari perilaku pengelolaan keuangan personal, yang berakibat dengan tidak stabilnya pengalokasian pendapatan untuk tabungan.

Tentunya akan menjadi masalah ketika seorang individu tidak dapat mengelola keuangan pribadinya dengan baik dan bertanggung jawab. Akibat yang terjadi jika tidak mengelola keuangan dengan baik dapat muncul masalah

keuangan. Apalagi jika seorang pegawai sudah berkeluarga, pasti butuh pengelolaan keuangan yang tepat agar pendapatan yang dimiliki dapat mencukupi kebutuhan selama sebulan penuh atau sampai pendapatan berikutnya diperoleh. Bila dilihat kembali bahwa upah/gaji yang diperoleh pegawai yang berkerja penuh waktu (8 jam kerja dalam sehari yang setara dengan 40 jam perminggu) sudah diperhitungkan oleh pemerintah setempat dan keluarlah tingkat Upah Minimum Regional (UMR) yang pada setiap wilayah berbeda-beda dan telah disesuaikan dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dimasing-masing wilayah. Dalam menentukan Upah Minimum Regional (UMR) setiap wilayah berpatokan dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). UMR bisa berada pada standar yang sesuai dengan KHL bisa juga melebihi angka KHL, hal itu tergantung dengan kesepakatan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan di setiap wilayah. Jika pendapatan yang diperoleh sesuai dengan UMR akan lebih baik jika seorang pegawai dapat menyisihkan uangnya khususnya untuk menabung. Hal ini berguna jika seorang pegawai ingin terhindar dari masalah kemudian yang dapat terjadi kapan saja. Tidak perlu nominal yang besar untuk dapat menabung, namun harus rutin dalam melakukan aktivitas tersebut sehingga di kemudian hari dapat menghasilkan nilai lebih. Karena terjadinya masalah keuangan bahkan tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi, yang bisa dilakukan hanya berjaga-jaga jika terjadi masalah keuangan.

Jika dilihat dari estimasi pemerintah setempat dalam menetapkan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) pada wilayah tertentu, sudah sesuai atau diatas standar Kehidupan Hidup Layak (KHL) dan seharusnya seorang pegawai mampu dalam mengelola keuangannya dan dapat menyisihkan sebagian pendapatannya

untuk dana darurat atau ditabung dengan motif berjaga-jaga. Namun, jika pendapatan yang dimiliki tidak sesuai dengan UMR dapat menyebabkan seorang individu kesulitan dalam mengelola keuangannya. Dalam prakteknya, seorang pegawai dengan pendapatan sesuai dengan UMR seringkali masih mengalami pendapatannya habis tidak tersisa karena penggunaan uang yang kurang tepat dan belum bisa dalam menentukan prioritas yang harus didahulukan. Sebaiknya seorang pegawai mulai menentukan skala prioritas seperti melakukan pembayaran tagihan tepat waktu, menyisihkan sebagian pendapatannya untuk menabung, dapat membuat individu terbiasa dengan mengendalikan keuangannya, namun jika sudah berkeluarga yang paling penting dapat mengontrol penggunaan uang untuk kebutuhan yang tidak penting. Saat individu mampu dalam mengontrol keuangannya akan terhindar dari masalah keuangan, karena individu mampu untuk menahan diri dalam penggunaan uang pribadinya secara berlebihan. Jika individu tidak mampu dalam mengontrol keuangannya berdampak dengan pendapatannya sudah habis sebelum memperoleh pendapatan pada bulan selanjutnya. Dari sini, paling tidak seorang pegawai diharapkan memiliki pola pikir dalam mengelola keuangan dengan baik karena saat individu memiliki pemikiran dalam mengelola keuangan dengan baik akan berdampak dengan keuangan yang sehat dan terhindar dari masalah dikemudian hari.

Salah satu yang mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan personal adalah pengetahuan keuangan. Hal yang mendasari individu dalam memiliki pengetahuan keuangan adalah tingkat pendidikan yang dimiliki. Jenjang pendidikan memang tidak menjamin sepenuhnya individu memiliki pengetahuan keuangan yang baik, namun setidaknya dengan jenjang pendidikan setidaknya

akan membuka wawasan yang dimiliki individu. Karena dengan pendidikan yang baik, individu diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Tidak bisa dipungkiri setiap individu menginginkan keuangan yang sehat, maka diperlukannya pengetahuan keuangan yang dipraktekkan kedalam pengelolaan keuangan pribadi. Ada berbagai sumber untuk memiliki pengetahuan keuangan, salah satunya pendidikan formal maupun sumber-sumber informal. Pendidikan formal dapat melalui program sekolah tinggi atau kuliah, seminar, dan kelas pelatihan yang ada diluar kelas (Kholilah dan Iramani, 2013). Berikut persentase tingkat pendidikan masyarakat di Surabaya berkisar diangka 16.55% (tidak punya ijazah), 17.81% (SD/Sederajat), 19.62% (SMP/Sederajat), 22.62% (SMA/Sederajat), 9.56% (SMK/MAK), 2.86% (D1/D2/D3), 10.03% (D4/S1), 0.95% (S2/S3) (<https://surabayakota.bps.go.id>) Diakses 17 Januari 2020.

Dari persentase tersebut dapat diasumsikan bahwa ada kemungkinan individu yang memiliki pengetahuan keuangan secara formal banyak dimiliki oleh individu dengan tingkat pendidikan minimal D1, karena pada jenjang tersebut individu dirangsang untuk membuka wawasan akan banyak hal terutama apa yang menjadi kompetensi dalam menempuh pendidikan tersebut. Dengan minimal pernah mendengar istilah-istilah tertentu yang berhubungan dengan keuangan, individu akan mencari tahu dan jelas hal itu dapat menambah pengetahuan juga membuka wawasan yang lebih luas lagi. Sedangkan untuk sumber-sumber informal dapat diperoleh melalui orang tua, teman, rekan kerja, atau pengalaman pribadi (Kholilah dan Iramani, 2013). Namun, pendidikan formal bukanlah menjadi hal yang utama dalam menambah pengetahuan apalagi di era digital

seperti sekarang yang dimana banyak informasi mudah untuk didapatkan hanya dengan *browsing internet*. Sangat diperlukan seorang pegawai untuk menambah pengetahuannya tentang keuangan agar dapat mengelola keuangan pribadinya dengan baik dan dapat terhindar dari masalah keuangan.

Perilaku pengelolaan keuangan personal merujuk kepada bagaimana individu dalam mengelola keuangan pribadinya agar dapat terbebas dari masalah keuangan. Perilaku pengelolaan keuangan personal adalah kemampuan yang dimiliki seorang individu dalam mengelola sebuah penganggaran, penyimpanan, perencanaan, dan pengendalian dana keuangan dalam kehidupan sehari-hari (Kholilah dan Iramani, 2013). Setiap individu memiliki caranya tersendiri dalam mengelola keuangan pribadi masing-masing tergantung dengan pendapatan yang diterimanya dalam pada tiap bulannya. Munculnya perilaku pengelolaan keuangan personal merupakan dampak dari besarnya hasrat individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan tingkat pendapatan yang diperoleh (Kholilah dan Iramani, 2013). Individu yang memiliki tingkat pendapatan harus mampu dalam melakukan kegiatan keuangannya seperti merencanakan, menyimpan dan mengendalikan dalam mengatur keuangannya sehingga perilaku pengelolaan keuangan personal berhubungan dengan tanggung jawab individu mengenai cara mengelola keuangannya. Tanggung jawab keuangan adalah bagaimana individu memikirkan proses pengelolaan keuangan pribadinya dan aset lainnya dengan cara yang efektif. Cara mengelola keuangan dengan efektif dapat diterapkan dengan melakukan pengaturan penganggaran, menilai pembelian sesuai kebutuhan. Salah satu hal penting dalam proses pengelolaan keuangan personal adalah mengatur anggaran keuangan. Anggaran keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa

individu khususnya seorang pegawai mampu dalam mengelola keuangannya secara tepat dengan menggunakan penghasilan yang diterima dalam periode tertentu, paling tidak antara pendapatan dan pengeluaran bisa seimbang. Jika seorang pegawai memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan maka kecenderungan yang dimiliki adalah mampu dalam membuat anggaran, menghemat uang, bahkan menyisihkan uang untuk ditabung.

Terdapat berbagai faktor yang mungkin dapat mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan personal. Menurut Rizkiawati dan Asandimitra (2018) hasil penelitiannya menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan personal adalah demografi, pengetahuan keuangan, sikap keuangan, *locus of control* dan *financial self-efficacy*. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Kholilah dan Iramani (2013) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan personal diantaranya *locus of control*, pengetahuan keuangan, dan pendapatan. Dari pendapat diatas, faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan personal pada penelitian ini adalah pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan *locus of control*.

Variabel pertama adalah Pengetahuan Keuangan. Pengetahuan keuangan adalah sebuah kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, kemampuan, dan kebiasaan yang diperlukan untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat dan pada akhirnya dapat mencapai kondisi keuangan yang memuaskan (Atkinson dan Messy, 2011). Tujuan dari pengetahuan keuangan salah satunya agar individu dapat membuat keputusan yang tepat terhadap uang. Pengetahuan keuangan mencakup pengetahuan dasar keuangan, asuransi, investasi, simpanan dan hutang. Hal umum

yang diketahui dan dipraktekkan adalah simpanan dan hutang. Namun untuk mencapai sebuah kesejahteraan keuangan, individu harus mampu mengatur keuangannya dengan baik. Kesejahteraan keuangan merujuk pada kondisi keuangan individu dalam keadaan baik dan terhindar dari masalah keuangan. Saat individu memiliki manajemen hutang yang baik, akan mampu dalam mengatasi terlilitnya hutang dikemudian hari dikarenakan kurangnya rasional dalam penggunaan uang yang berakibat pendapatan tidak cukup. Berhutang adalah jalan yang banyak diambil oleh masyarakat jika mereka sedang mengalami kesulitan keuangan. Namun jika berhutang terus-menerus akan membuat seorang individu terbiasa menyelesaikan masalah keuangannya dengan meminjam uang pada orang lain, tetapi tidak berupaya untuk mengevaluasi pengelolaan keuangannya sendiri sehingga dapat meminimalkan hutang. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan keuangan yang baik agar individu dapat mengelola keuangannya dengan bijak dan bertanggung jawab. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Rachmiyantono (2019) menyatakan bahwa pengetahuan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan personal. Sedangkan, hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan Nobriyani dan Haryono (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan personal.

Variabel selanjutnya adalah Sikap Keuangan. Menurut Rajna *et al*, (2011) mengemukakan sikap keuangan adalah penilaian, pendapat ataupun keadaan pikiran seseorang terhadap keuangan yang diterapkan ke dalam sikapnya. Sikap keuangan yaitu kecenderungan sikap yang bersifat positif dan negatif terhadap uang (Zainiati, 2017). Sikap keuangan akan membantu individu untuk mengerti

apa yang dipercaya terkait hubungan dirinya terhadap uang. Setiap individu memiliki sikap yang berbeda terhadap uang karena setiap individu berada dalam kondisi keuangan dan target keuangan yang beda tiap individunya. Ketika individu mulai terobsesi dengan uang, maka individu tersebut akan mulai berpikir tentang bagaimana cara memperoleh uang dan bagaimana penggunaan uang yang dimilikinya. Dengan begitu dapat mendorong individu untuk mempunyai pola pikir terhadap keuangan di masa depan. Hal ini didukung dengan teori perilaku terencana yaitu teori yang menyatakan bahwa perilaku individu dalam melakukan suatu hal karena ada niat. Niat individu dalam berperilaku ditentukan oleh salah satu faktor yaitu sikap. Sehingga besar kemungkinan bahwa sikap keuangan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan personal. Oleh karena itu, bila individu menunjukkan sikap keuangan yang baik maka perilaku pengelolaan keuangannya pun baik dan bertanggung jawab. Hal ini diperjelas juga dengan penelitian (Khairani dan Alfarisi, 2019) yang menunjukkan bahwa sikap keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan personal. Sedangkan, hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian Budiono (2020) menunjukkan bahwa sikap keuangan berpengaruh terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Personal.

Variabel selanjutnya yang dapat mempengaruhi adalah *Locus of Control*. Menurut Munir dan Sajid (2010) mengemukakan *locus of control* adalah cerminan dari sebuah kecenderungan seorang individu untuk percaya bahwa mereka dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi dalam hidupnya atau kendali atas peristiwa yang terjadi dalam hidupnya itu berasal dari hal lain, misalnya kuasa orang lain. *Locus of Control* dapat diartikan sebagai bagaimana individu memandang sebuah

kejadian dalam hidupnya apakah individu tersebut dapat atau tidak dalam mengendalikan kejadian tersebut. Seorang individu dengan *Locus of Control* beranggapan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya adalah hal yang bisa dikontrol dan sudah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jika seorang pegawai memiliki *Locus of Control* maka berguna dalam pengendalian dirinya dalam pengelolaan keuangan yang dimilikinya dan akan dapat mengontrol dirinya untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan uang, seperti mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum membelanjakan sesuatu agar terhindar dari penggunaan uang secara konsumtif. Oleh karena itu, baik bagi seorang pegawai memiliki *Locus of Control* dalam perilaku pengelolaan keuangannya. Hal ini diperjelas juga dengan penelitian (Rizkiawati dan Asandimitra, 2018) yang menunjukkan bahwa *Locus of Control* berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan personal. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian (Rachmiyantono, 2019) menunjukkan bahwa *Locus of Control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan personal.

Dalam penelitian ini dimana pegawai swasta sebagai target yang seharusnya dapat memenuhi perilaku pengelolaan keuangan karena pegawai swasta merupakan komponen yang cukup besar dalam masyarakat memiliki sifat konsumtif yang tinggi dan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Pegawai swasta harus dimiliki pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan *locus of control* untuk mendukung individu dalam berperilaku pengelolaan keuangan personal yang bertanggung jawab. Peneliti memilih pegawai swasta di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya sebagai responden mengingat bahwa di Kecamatan Rungkut terdapat banyak perusahaan sehingga jumlah pegawai

swastanya pun juga banyak. Maka diharapkan hasil kuesioner nantinya dapat menghasilkan suatu data yang valid. Selain itu, Kecamatan Rungkut dipilih berdasarkan lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau oleh peneliti. Sehingga, akan mendukung peneliti untuk berinteraksi dengan responden.

Berdasarkan latar belakang, data, dan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang terkait dengan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi Perilaku Pengelolaan Keuangan Personal yang dilakukan oleh pegawai swasta yang bekerja di Kecamatan Rungkut Surabaya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada **“Analisis Perilaku Pengelolaan Keuangan *Personal* Pada Pegawai Swasta di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh Pengetahuan Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Personal pada Pegawai Swasta di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya ?
2. Adakah pengaruh Sikap Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Personal pada Pegawai Swasta di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya ?
3. Adakah pengaruh *Locus Of Control* terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Personal pada Pegawai Swasta di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Personal pada Pegawai Swasta di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sikap Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Personal pada Pegawai Swasta di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Locus Of Control* terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Personal pada Pegawai Swasta di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Dari penelitian ini, diharapkan penulis dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta informasi atau gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Dari penelitian ini, diharapkan sebagai referensi serta bahan kajian bagi peneliti lain yang akan mengembangkan dan melakukan penelitian serupa lebih lanjut.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dari penelitian ini, diharapkan sebagai bahan referensi untuk menambah informasi dan bahan bacaan sehingga dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya serta menambah pengetahuan untuk mahasiswa lain agar bermanfaat di masa yang akan datang.

4. Bagi Pegawai Swasta

Dari penelitian ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan referensi bacaan dan menjadi sumber wawasan baru mengenai perilaku pengelolaan keuangan sehingga pegawai swasta akan semakin mengerti pentingnya pengelolaan keuangan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.